



doi: <http://dx.doi.org/10.25157/ja.v13i2.24100>

PERLAWANAN NON-KEKERASAN TIRTO ADHI SOERJO MELALUI SURAT KABAR *MEDAN PRIJAJI* TERHADAP PEMERINTAH KOLONIAL HINDIA BELANDA (1907-1910)

Nurul Kurniawati¹, Yustina Sri Ekwandari², Marzius Insani³, Myristica Imanita⁴

^{1,2,3,4} Universitas Lampung, Indonesia

Email Koresponden: nurulkurniawati1730@gmail.com

Article history: Submitted: 2026-04-28 | Accepted: 2026-10-11 | Published 2026-10-19

Abstrak

Penelitian mengenai pers bumiputra pada awal abad ke-20 umumnya menempatkan *Medan Prijaji* sebagai media nasionalisme, sementara kajian yang menganalisis surat kabar tersebut sebagai instrumen perlawanan non-kekerasan berbasis teori Gene Sharp masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlawanan non-kekerasan Tirto Adhi Soerjo melalui surat kabar *Medan Prijaji* terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda 1907-1910. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menginterpretasikan *Medan Prijaji* menggunakan teori Gene Sharp untuk memperluas kajian mengenai bentuk perlawanan non-kekerasan dalam sejarah pers Indonesia. Penelitian menggunakan metode historis dengan pendekatan *historical discourse analysis* melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta dokumentasi arsip surat kabar *Medan Prijaji* tahun 1909-1910. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Medan Prijaji* digunakan sebagai media perlawanan non-kekerasan melalui metode protes dan persuasi berupa kritik hukum, sosial, ekonomi, birokrasi kolonial, dan agraria. Tirto Adhi Soerjo memanfaatkan pers untuk membangun opini publik, menyebarkan kesadaran politik, serta menggugat legitimasi moral pemerintah kolonial. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kajian sejarah pers dan kolonialisme dengan menempatkan surat kabar bumiputra sebagai arena resistensi ideologis berbasis wacana. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa perlawanan melalui pers tidak menghasilkan perubahan kebijakan secara langsung, tetapi berperan penting dalam membentuk kesadaran nasional awal masyarakat bumiputra.

Kata Kunci: Tirto Adhi Soerjo, *Medan Prijaji*, Perlawanan

Abstract

Research on the indigenous press in the early 20th century generally positions *Medan Prijaji* as a medium of nationalism, while studies analyzing the newspaper as an instrument of non-violent resistance based on Gene Sharp's theory are still limited. This study aims to examine Tirto Adhi Soerjo's non-violent resistance through the *Medan Prijaji* newspaper against the Dutch East Indies colonial government from 1907 to 1910. It offers a fresh perspective by interpreting *Medan Prijaji* through the lens of Gene Sharp's theory, thereby broadening the study of non-violent resistance within the history of the Indonesian Press. The study uses a historical method with a historical discourse analysis approach through the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data were obtained through library studies and archival documentation of the *Medan Prijaji* newspaper from 1909 to 1910. The results show that *Medan Prijaji* was used as a medium of non-violent resistance through methods of protest and persuasion in the form of legal, social, economic, colonial bureaucratic, and agrarian criticism. Tirto Adhi Soerjo utilized the press to build public opinion, spread political awareness, and challenge the moral legitimacy of the colonial government. This study contributes to strengthening the study of the history of the press and colonialism by positioning indigenous newspapers as an arena for discourse-based ideological resistance. The research conclusion shows that resistance through the press did not result in direct policy changes, but played an important role in shaping the initial national consciousness of the native people.

Keywords: Tirto Adhi Soerjo, *Medan Prijaji*, Resistance

PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial dan diskriminasi politik yang berlangsung

dalam sistem kolonial Hindia Belanda pada awal abad ke-20 melahirkan berbagai bentuk resistensi dari kalangan bumiputra. Sistem

ekonomi liberal yang diterapkan pemerintah kolonial pada periode 1870-1900 tidak hanya memperluas dominasi modal swasta Eropa, tetapi juga memperkuat eksploitasi terhadap tanah dan tenaga kerja masyarakat pribumi (Amandah, 2021).

Penurunan kesejahteraan ini disadari baik oleh kalangan di Hindia Belanda maupun di negeri Belanda, sehingga tokoh-tokoh seperti Piet Brooshooft dan Van Deventer mendorong lahirnya gagasan perbaikan kondisi rakyat pribumi (Niel, 2009). Gagasan tersebut kemudian berkembang menjadi apa yang dikenal sebagai *Politik Etis*, sebuah kebijakan yang menuntut negara memenuhi “utang kehormatan” terhadap rakyat jajahan melalui pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Hindia Belanda yang telah mengalami kesengsaraan dan kemiskinan akibat perlakuan buruk selama *cultuurstelsel* (Insani et al., 2021).

Penerapan Politik Etis sejak 1901 melahirkan kelompok sosial baru yang disebut sebagai elite modern atau priyayi baru. Kelompok ini menjadi agen perubahan dan pelopor awal gerakan nasional. Tanda awal nasionalisme terlihat dengan berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama yang memperjuangkan kemajuan bangsa melalui jalur pendidikan dan organisasi, serta perjuangan politik melawan kolonialisme Belanda (Imanita et al., 2025). Bentuk perjuangan juga berubah, dari perlawanan lokal sebelum 1900, menjadi gerakan berskala nasional setelah memasuki abad ke-20 yang memanfaatkan organisasi modern dan pers sebagai sarana perjuangan (Cahyani, 2023).

Pada masa pergerakan nasional, media massa memiliki kontribusi

signifikan dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme dan semangat patriotisme di kalangan masyarakat (Hagen, 1997). Melalui kemampuannya membentuk opini publik, media massa, terutama surat kabar, menjadi sarana yang efektif dalam memengaruhi cara berpikir masyarakat. Dibandingkan dengan jenis media lainnya, pers memiliki kekuatan persuasi yang lebih besar dalam menyampaikan gagasan, membangun kesadaran kolektif, serta mendorong lahirnya sikap kebangsaan (Anggraeni et al., 2022).

Pers sebagai medium komunikasi politik tidak hanya berfungsi menyebarkan informasi, tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen resistensi terhadap kekuasaan yang dominan. Gene Sharp (1973) menjelaskan bahwa perlawanan non-kekerasan dapat dilakukan melalui metode protes dan persuasi yang memanfaatkan media komunikasi untuk membangun opini publik, menyebarkan kritik, serta menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat. Penggunaan media cetak sebagai sarana perjuangan memungkinkan kelompok yang berada dalam posisi subordinat menyampaikan penolakan terhadap ketidakadilan tanpa menggunakan kekerasan fisik (Sharp, 1973).

Perkembangan pers bumiputra pada masa pergerakan nasional memperlihatkan munculnya media yang tidak lagi sekedar berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga perjuangan politik dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat pribumi. Pers di Hindia Belanda pada masa pergerakan hingga kemerdekaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pers kolonial, pers Cina, dan pers nasional. Pers kolonial dikelola oleh pemerintah atau kelompok Eropa dengan menggunakan bahasa Belanda, sedangkan pers Cina diterbitkan oleh masyarakat keturunan Tionghoa dengan penggunaan bahasa yang beragam, seperti Cina, Melayu, maupun Belanda. Pers nasional dikelola oleh kaum bumiputra dan diarahkan untuk

memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi. Salah satu surat kabar yang menonjol dalam perkembangan pers nasional adalah *Medan Prijaji* yang didirikan oleh R.M. Tirto Adhi Soerjo pada tahun 1907 (Efendi, 2019). Kehadiran surat kabar ini menandai berkembangnya penggunaan pers sebagai sarana perjuangan politik dan pembentukan kesadaran kebangsaan di kalangan bumiputra (Adam, 2023).

Tirto Adhi Soerjo berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh penting di lingkungan keraton. Ia sempat menempuh pendidikan di STOVIA, namun tidak menyelesaikannya karena lebih tertarik pada dunia jurnalistik (As'ad, 2012). Melalui surat kabar *Medan Prijaji*, Tirto berperan aktif dalam membela masyarakat dari ketidakadilan kolonial. Surat kabar ini menjadi wadah pengaduan rakyat, di mana Tirto tidak hanya menulis, tetapi juga turun langsung mengumpulkan bukti dan memperjuangkan kasus hingga ke ranah hukum (Dahlan & Raditya, 2008).

Pendirian surat kabar *Medan Prijaji* oleh Tirto Adhi Soerjo dimaksudkan sebagai sarana untuk membangkitkan kesadaran nasional di kalangan pribumi, agar mereka memahami realitas penindasan yang dialami oleh bangsanya. Hal ini terlihat dari slogan surat kabar *Medan Prijaji* yaitu:

“SOERA bagai sekalian Radja-radja, Bangsawan asali dan fikiran, Prijaji dan saudagar Boemipoetra dan officier-officier serta saudagar-saudagar dari bangsa jang terperintah laenja, jang dipersamakan dengan anaknegeri, di seloeroeh Hindia Belanda”

Slogan tersebut menunjukkan bahwa “bangsa yang memerintah” dan “bangsa yang diperintah” ada di Hindia Belanda. Istilah “bangsa yang diperintah”

mengandung makna politik yang mencerminkan kondisi diskriminatif dan represif dari pemerintah kolonial. Hal ini kemudian membentuk identitas kolektif yang menumbuhkan rasa senasib dan persatuan antar suku bangsa (Fachrurrozi, 2019).

Tirto Adhi Soerjo menyadari peran pers sebagai alat perlawanan terhadap pemerintah kolonial sekaligus sebagai sarana pengaduan bagi masyarakat bumiputra yang mengalami ketidakadilan. Surat kabar *Medan Prijaji* termasuk surat kabar bumiputra yang secara konsisten mengkritik praktik diskriminasi kolonial serta mendorong gagasan kemandirian politik bagi kaum pribumi (Ravando, 2021). Melalui *Medan Prijaji*, ia menjadikan surat kabar ini sebagai corong publik dengan gaya tulisan yang lugas dan kritis, sehingga mampu menggugah berbagai pihak (Dahlan & Raditya, 2008). Pemikiran kritisnya terbentuk dari pengalaman hidup dalam struktur sosial kolonial yang timpang, di mana pribumi berada dalam posisi tertindas. Pengaruh tokoh seperti R.A.A. Prawiradiredja turut membentuk pandangannya bahwa kepentingan rakyat harus menjadi prioritas (As'ad, 2012).

Pada awal abad ke-20, kebebasan pers sempat meningkat pada masa Van Heutsz, yang memungkinkan kritik terhadap pejabat kolonial dan memperkuat peran jurnalis sebagai pembentuk opini publik (Waluyo, 2003). Namun, kebijakan ini berubah di era Idenburg yang kembali menerapkan sistem represif, membatasi kebebasan pers, dan menindak tokoh-tokoh kritis seperti Tirto hingga mengalami pembuangan ke Teluk Betung (Mulyadi, 2021). Meski demikian, Tirto tetap konsisten menggunakan pers sebagai sarana kritik, bahkan melalui karya fiksi, dengan penekanan yang semakin kuat pada gagasan kemerdekaan kolektif (Setyowati, 2003).

Kekuatan Tirto terletak pada pemahamannya terhadap hukum kolonial yang

digunakan untuk mengungkap ketidakadilan sistem yang berpihak pada elite dan merugikan rakyat pribumi (Toer, 1985). Melalui surat kabar *Medan Prijaji*, ia menyuarakan kepentingan masyarakat, menjadikan pers sebagai alat advokasi, propaganda, dan pembentuk kesadaran politik.

Pergerakan yang dipelopori surat kabar *Medan Prijaji* berada dalam arus besar kebangkitan pers bumiputra pada awal abad ke-20. Semangat kemajuan yang dipicu oleh Politik Etis memberi peluang bagi kaum terpelajar untuk memanfaatkan media cetak sebagai wahana pembentukan opini publik. Surat kabar menjadi medium untuk mengartikulasikan kritik terhadap kebijakan kolonial, mengemukakan gagasan pembaruan sosial, serta membangun kesadaran kolektif sebagai “bangsa yang terperintah”. Aktivitas jurnalistik ini sekaligus menandai munculnya generasi intelektual bumiputra yang tidak hanya melek huruf, tetapi memiliki keberanian politik dalam menentang relasi kuasa yang timpang (Aini & Aria, 2018).

Penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara pers bumiputra, *Medan prijaji*, dan perkembangan kesadaran nasional pada awal abad ke-20, tetapi fokus dan pendekatan yang berbeda dengan penelitian ini. Hasan Muklis & Arif Saefudin (2024) dalam penelitian berjudul “*Resistance Through the Pen: A Critical Analysis of the Role of Prijaji Field in the National Movent (1907-1914)*” mengkaji peran strategis *Medan Prijaji* dalam mobilisasi sosial-politik dan pembentukan kesadaran nasional pada periode 1907-1914. Penelitian tersebut menunjukkan posisi penting *Medan Prijaji* dalam gerakan nasional, tetapi belum secara

khusus menganalisis praktik jurnalistik Tirto sebagai bentuk perlawanan non-kekerasan terhadap pemerintah kolonial.

R. M. Joko Prawoto Mulyadi (2021) melalui penelitian “*Press Natinalism: A Case Study of the Role of Medan Prijaji in Growing National Awerness*” memfokuskan kajian pada peran *Medan Prijaji* dalam menumbuhkan kesadaran nasional dan membentuk opini publik. Kajian tersebut memperlihatkan fungsi pers dalam perkembangan nasionalisme, tetapi belum menguraikan penggunaan surat kabar sebagai metode perlawanan terhadap praktik dan kebijakan kolonial dengan menggunakan kerangka teori perlawanan non-kekerasan. Sementara itu, Miftahul Habib Fachrurozi (2017) dalam penelitian “*Pers dan Bangkitnya Kesadaran Nasional Indonesia pada Awal Abad XX*” membahas perkembangan pers dan peran kapitalisme cetak dalam penyebaran kesadaran nasional secara lebih luas. Berbeda dari penelitian tersebut yang membahas pers secara umum, penelitian ini memusatkan perhatian pada Tirto Adhi Soerjo dan *Medan Prijaji* sebagai sarana perlawanan terhadap pemerintah kolonial.

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Medan Prijaji* dan pers bumiputra memiliki peran dalam pembentukan kesadaran nasional, mobilitas sosial-politik, dan penyebaran gagasan kebangsaan. Namun, belum terlihat analisis secara khusus menempatkan praktik jurnalistik Torto Adhi Soerjo melalui *Medan Prijaji* sebagai bentuk perlawanan non-kekerasan dengan menggunakan teori Gene Sarp. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis bentuk protes dan persuasi melalui pemberitaan, kritik, dan pengungkapan ketidakadilan kolonial dalam *Medan Prijaji* pada periode 1907-1910. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam kajian sejarah pers dengan memandang surat kabar bumiputra tidak hanya sebagai media pembentuk nasionalisme, tetapi juga sebagai

instrumen perlawanan non-kekerasan terhadap kekuasaan kolonial.

Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlawanan non-kekerasan Tirto Adhi Soerjo melalui surat kabar *Medan Prijaji* terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 1907-1910. Analisis difokuskan pada penggunaan surat kabar sebagai sarana kritik terhadap praktik kolonial, pembentukan opini publik, dan penyebaran kesadaran politik di kalangan bumiputra.

Penelitian ini menggunakan teori perlawanan non-kekerasan Gene Sharp (1973). Sharp mengklasifikasikan perlawanan non-kekerasan ke dalam tiga bentuk, yaitu protes dan persuasi, *noncooperation*, serta *nonviolent intervention*. Penelitian ini berfokus pada metode protes dan persuasi, khususnya penggunaan media massa sebagai sarana kritik, membangun opini publik, dan menumbuhkan kesadaran politik. Kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis pemberitaan *Medan Prijaji* sebagai praktik perlawanan Tirto Adhi Soerjo terhadap pemerintah kolonial.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis. Metode historis digunakan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu melalui pengumpulan, pengujian, dan penafsiran sumber sejarah secara sistematis. Metode ini memungkinkan peneliti memahami perkembangan perlawanan intelektual yang dilakukan Tirto Adhi Soerjo melalui surat kabar *Medan Prijaji* berdasarkan sumber-sumber sezaman yang relevan. Tahapan penelitian historis meliputi heuristik, kritik

sumber, interpretasi, dan historiografi (Sukmana, 2021).

Pemilihan metode historis didasarkan pada karakter penelitian yang berfokus pada rekonstruksi peristiwa masa lalu melalui penelusuran sumber-sumber sezaman, khususnya arsip surat kabar *Medan Prijaji* periode 1907-1910. Metode ini memungkinkan peneliti menelusuri dinamika pemikiran, bentuk kritik, serta strategi perlawanan yang dikembangkan Tirto Adhi Soerjo terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Penggunaan metode historis juga relevan karena penelitian tidak hanya menempatkan surat kabar sebagai dokumen informasi, tetapi sebagai produk sosial-politik yang merefleksikan relasi kuasa, ketidakadilan kolonial, dan berkembangnya kesadaran politik bumiputra pada awal abad ke-20. Berikut merupakan tahapan penelitian historis yang meliputi:

1. Heuristik, merupakan tahap awal dalam penelitian sejarah yang bertujuan untuk menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Istilah heuristik berasal dari bahasa Yunani *heuriskein* yang berarti “menemukan”, sehingga tahap ini berkaitan dengan proses pencarian data tentang peristiwa masa lalu (Ravico et al., 2023). Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan sumber primer dan sekunder seperti arsip, buku, dokumen, koran, dan jurnal. Selain itu, pencarian juga dilakukan melalui platform digital seperti Internet Archive, Delpher, dan laman Universitas Leiden untuk menelusuri arsip surat kabar lama yang berkaitan dengan surat kabar *Medan Prijaji*.
2. Kritik sumber, merupakan tahap untuk menilai keaslian, kebenaran, dan kredibilitas sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian (Usmaedi, 2023). Kritik ini terdiri dari kritik eksternal yang menguji asal-usul dan keutuhan sumber, serta kritik internal yang menilai isi dan validitas

informasi dengan membandingkan sumber lain (Herdiani, 2016). Dari berbagai arsip yang diperoleh, tidak semuanya dapat digunakan karena kondisi fisik yang rusak, sehingga peneliti memilih sumber yang masih terbaca dan relevan, Surat Kabar *Medan Prijaji* tahun 1909-1910. Pemilihan ini didasarkan pada keterbacaan, kesesuaian dengan fokus kajian, serta kekuatan isi yang memuat kritik terhadap pemerintah kolonial, seperti ketidakadilan hukum, kesenjangan sosial, eksploitasi rakyat, dan persoalan agraria.

3. Interpretasi, merupakan tahap penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang diperoleh dari arsip surat kabar, dokumen, dan sumber pendukung lainnya untuk memahami makna sosial-politik di balik pemberitaan *Medan Prijaji* (Zulaicha, 2014). Pada tahap ini, peneliti menafsirkan bentuk kritik, sindiran, dan argumentasi yang digunakan Tirto Adhi Soerjo sebagai strategi perlawanan non-kekerasan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda.
4. Historiografi, merupakan tahap penyusunan hasil penelitian ke dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis dan analitis. Fakta-fakta yang telah diverifikasi kemudian disusun untuk menjelaskan bentuk perlawanan non-kekerasan Tirto Adhi Soerjo melalui *Medan Prijaji*, serta kaitannya dengan berkembangnya kesadaran politik bumiputra pada awal abad ke-20.

Teknik pengumpulan data merupakan proses sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan guna menjawab permasalahan penelitian (Adil et al., 2023). Dalam penelitian ini digunakan teknik kepustakaan dan dokumentasi. Teknik kepustakaan dilakukan dengan

mengkaji buku, jurnal, dan penelitian terdahulu sebagai landasan teori, sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa arsip terkait surat kabar *Medan Prijaji* guna memahami isi dan perannya dalam pergerakan nasional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *historical discourse analysis* (analisis wacana historis) untuk mengkaji isi pemberitaan surat kabar *Medan Prijaji*. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana bahasa, kritik, sindiran, dan argumentasi yang ditulis Tirto Adhi Soerjo merepresentasikan bentuk perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Analisis tidak hanya difokuskan pada isi teks secara literal, tetapi juga pada makna sosial-politik yang terkandung di dalamnya, termasuk relasi kuasa, praktik diskriminasi, serta upaya pembentukan kesadaran kolektif bumiputra melalui media pers. Pendekatan ini memungkinkan surat kabar dipahami sebagai arena produksi wacana politik yang digunakan untuk membangun kritik terhadap hegemoni kolonial Hindia Belanda.

Analisis data dilakukan secara historis dan interpretatif terhadap artikel-artikel *Medan Prijaji* yang telah diseleksi melalui kritik sumber. Unit analisis berupa artikel atau pemberitaan yang memuat kritik, pengaduan, sindiran, dan argumentasi Tirto Adhi Soerjo terhadap praktik atau kebijakan kolonial. Pemilihan artikel didasarkan pada tiga pertimbangan, yaitu keterbacaan dan keutuhan teks, kesesuaian dengan fokus penelitian, serta kandungan kritik terhadap persoalan kolonial. Artikel yang terpilih kemudian diidentifikasi dan dikelompokan berdasarkan isu yang dibahas, meliputi kritik hukum, sosial, ekonomi, birokrasi, dan agraria. Setiap kategori dianalisis untuk mengidentifikasi bentuk kritik, sasaran kritik, serta cara penyampaian gagasan kepada masyarakat. Hasil kategorisasi selanjutnya diinterpretasikan menggunakan teori perlawanan non-kekerasan Gene Sharp,

hususnya metode protes dan persuasi, untuk melihat bagaimana pemberitaan Medan Prijaji digunakan sebagai sarana menyampaikan penolakan, membangun opini publik, dan menumbuhkan kesadaran politik bumiputra.

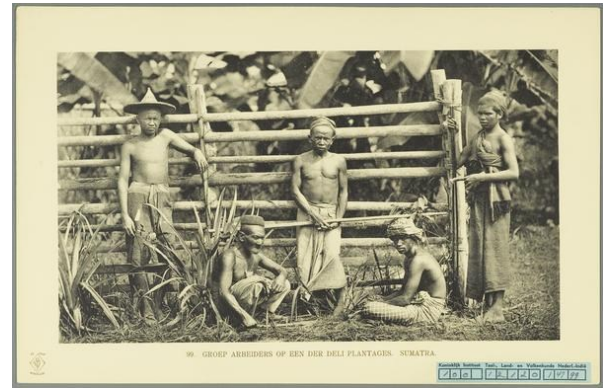
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Masyarakat Pribumi Hindia Belanda

Penduduk pribumi Hindia Belanda pada di abad ke-20 hidup dalam struktur sosial-politik yang sangat timpang. Kekuasaan dan kebijakan kolonial dikuasai oleh pejabat Eropa dan perusahaan asing, sementara masyarakat bumiputra hanya menempati posisi terendah dalam struktur masyarakat, tanpa akses politik dan hukum yang setara. Kebijakan agraria dan liberalisasi ekonomi membuka peluang besar bagi modal asing untuk menguasai tanah dan tenaga kerja, sehingga banyak rakyat pribumi kehilangan hak atas tanah adat dan dipaksa bekerja di perkebunan (Fahmi, 2020).

Sistem kontrak ditegakkan dengan regulasi kolonial seperti *Coolie Ordinance* 1880, memungkinkan pekerja dikontrol ketat dan menghadapi hukuman fisik, termasuk cambuk dan sanksi berat jika mencoba melarikan diri. Praktik ini mencerminkan bentuk eksploitasi struktural yang dianggap sah dalam pemerintah kolonial.



Gambar 1. Pekerja Perkebunan Deli

Sumber: *universiteitleiden.nl*

Dampak dari eksploitasi tenaga kerja tersebut juga berdampak pada keadaan sosial dan kesehatan. Pemukiman padat, sanitasi buruk, dan minimnya akses terhadap fasilitas kesehatan menyebabkan penyebaran penyakit seperti kolera serta tingginya angka kematian di kalangan kuli. Meskipun ada upaya perusahaan untuk menyediakan layanan medis di perkebunan, distribusi layanan itu sangat tidak merata dan sering kali tidak memadai (Junaidi et al., 2023).

Sistem hukum kolonial menempatkan pribumi pada posisi yang sangat lemah karena seluruh aturan dan lembaga peradilan dirancang untuk melindungi kepentingan pemerintah Belanda dan perusahaan swasta. Pribumi tidak diproses dalam sistem yang sama dengan orang Eropa; mereka berada di bawah *landraad* dan *politie-raad* yang memberi kewenangan luas kepada pejabat Eropa untuk menjatuhkan hukuman tanpa pembelaan yang memadai. Banyak kasus menunjukkan hukuman penjara maupun kekerasan fisik dapat dijatuhkan hanya berdasarkan laporan sepihak, sehingga mendorong penyalahgunaan kekuasaan. (Fahmi, 2020).

2. Gambaran Umum Surat Kabar Medan Prijaji (1907-1912)

Surat kabar *Medan Prijaji* terbit pada tahun 1907-1912 dan menempati posisi

penting dalam perkembangan pers di Hindia Belanda karena menjadi media pertama yang seluruh tim redaksinya berasal dari kalangan bumiputra. Seperti halnya Bintang Hindia, surat kabar ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Pada awal penerbitannya, *Medan Prijaji* hadir sebagai mingguan dengan format sederhana berukuran sekitar 12,5 x 19,5 cm dan tebal sekitar 22 halaman, serta dicetak di percetakan *Kho Tjing Bie* di Pancoran, Batavia. Isi rubriknya mencakup informasi mutasi pegawai negeri, salinan lembaran negara beserta lampirannya, surat pembaca dan tanggapannya, cerita bersambung, serta layanan bantuan hukum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat (Toer, 1985).

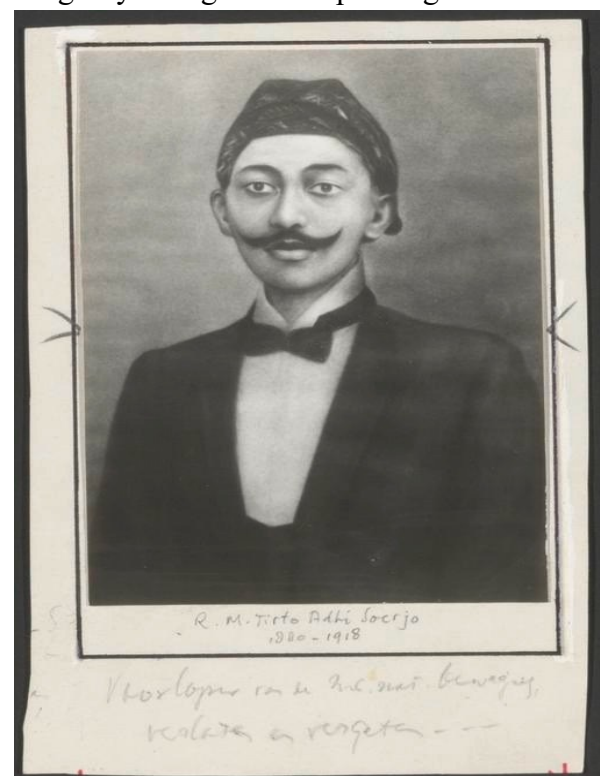


Gambar 2. Surat Kabar *Medan Prijaji*
Sumber: archive.org

Medan Prijaji dapat terbit berkat dukungan dana dari seorang tokoh yang disebut sebagai “raja” sebesar f 1.000, kemudian memperoleh tambahan dana f 500 dari “raja” lainnya. Baru kemudian diketahui bahwa “raja” pertama tersebut adalah Bupati Cianjur, R.A.A. Prawiradiredja, yang sebelumnya juga memberikan modal awal bagi penerbitan *Soenda Berita*. Sasaran utama surat kabar ini adalah kalangan pegawai negeri, sesuai dengan nama dan orientasinya. Namun, pegawai pada tingkatan rendah umumnya

tidak mampu berlangganan, sementara pegawai tingkat menengah pun memiliki pendapatan terbatas.

Untuk mengatasi keterbatasan modal, dikembangkan sebuah gagasan usaha dengan mekanisme pembayaran di muka oleh pelanggan sebagai imbalan atas kepemilikan saham perusahaan. Perusahaan tersebut, N.V. Medan Prijaji, didirikan oleh R.M. Tirto Adhi Soerjo bersama Haji Mohammad Arsad dan dikenal sebagai N.V. pertama milik pribumi. Modal yang dihimpun mencapai f 75.000, yang terbagi ke dalam 3.000 lembar saham, dengan saham seri pertama bernilai f 25.000 (Toer, 1985). Terdapat delapan butir gagasan yang di emban *Medan Prijaji*, yaitu: (1) Memberi informasi, (2) Menjadi penyuluh keadilan, (3) Memberikan bantuan hukum, (4) Tempat orang tersia-sia mengadukan halnya, (5) Mencari pekerjaan, (6) Menggerakkan bangsanya untuk berorganisasi atau mengorganisasi diri, (7) Membangun dan memajukan bangsanya, (8) Memperkuat bangsanya dengan usaha perdanganan.



Gambar 3. Tirto Adhi Soerjo
Sumber: universiteitleiden.nl

Tokoh utama di balik kemunculan dan perkembangan *Medan Prijaji* adalah Tirta Adhi Soerjo, yang lahir di Blora pada tahun 1880 dengan nama kecil Djokomono dan merupakan anak kesembilan dari sebelas bersaudara. Ia berasal dari keluarga bangsawan terhormat, ayahnya Raden Ngabehi Hadji Moehammad Chan Tirtodhipoero, bekerja sebagai pegawai di kantor perpajakan pemerintahan Hindia Belanda, serta dianugerahi penghargaan *Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw* sebagai bentuk pengakuan sipil tertinggi dari Kerajaan Belanda. Secara genealogis, Tirta memiliki keterkaitan dengan lingkungan aristokrasi Jawa, termasuk Kraton Surakarta, Panembahan terakhir Madura, serta RMAA Tjokronegoro yang menjabat sebagai Bupati Blora hingga tahun 1912, sehingga menempatkannya pada lapisan keempat dalam struktur kebangsawanan (As'ad, 2012).

Tirta Adhi Soerjo pernah menempuh pendidikan di STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*), namun tidak menyelesaikan studinya karena hanya mencapai tingkat empat setelah melalui tiga tahun masa persiapan. Minatnya yang lebih besar terhadap dunia pers membuatnya memilih meninggalkan jalur profesi sebagai dokter Jawa. Keterlibatan Tirta dalam kegiatan jurnalistik telah dimulai sejak masa sekolah di STOVIA, yakni sekitar usia 14-15 tahun, ketika ia aktif mengirimkan tulisan ke berbagai surat kabar di Batavia. Dalam kurun waktu 1888 hingga 1897, ia bekerja sebagai wartawan pembantu di harian Hindia Olanda yang dipimpin oleh Alex Regensburg. Pengalamannya tersebut mengantarkannya pada posisi penting, hingga pada tahun 1902 ia dipercaya memimpin surat kabar *Pembrita Betawi*, dan setahun kemudian mendirikan

media miliknya sendiri yang diberi nama *Soenda Berita*. Sayangnya kesulitan keuangan membuat *Soenda Berita* tidak mampu bertahan lama. Tahun 1906 ia memutuskan untuk pergi ke Maluku. Setahun berselang, Tirta Kembali ke Jawa untuk mendirikan *Medan Prijaji* (Fachrurrozi, 2017).

Medan Prijaji tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi saja namun juga mengupayakan perlindungan dan pembelaan terhadap hukum yang dialami oleh para pembacanya (Subijanto, 2017). Sikap ini lah yang membuat konfrontasi antara *Medan Prijaji* dan pemerintah kolonial tidak dapat terelakkan. Tahun 1907, Tirta berhasil melakukan pembongkaran terhadap skandal yang dilakukan Aspiran Kontrolir Purworedjo A. Simon dengan menggunakan *Medan Prijaji*. Tirta menggunakan *Medan Prijaji* sebagai sarana untuk melakukan penyadaran kemerdekaan kaum pribumi dari sisi ekonomi dan politik. Tirta mengungkapkan bahwa penduduk pribumi harus berfungsi sebagai tuan di negerinya sendiri (Setyowati, 2003). *Medan Prijaji* juga berkembang menjadi corong penting bagi kelas baru priyayi rendahan (Poeze, 1989).

Isi berita di dalam media massa pimpinan Tirta berpihak kepada kalangan yang dikuasai (bukan penguasa). Dampaknya, Tirta di hukum cambuk oleh Dominique Willem Baretty, sedangkan pemerintah Hindia Belanda melakukan penghukuman dengan cara mengasingkan Tirta ke Lampung. Baik pencambukan maupun pengasingan bertujuan agar Tirta takluk terhadap Lembaga pemerintah Hindia Belanda (Setyowati, 2003).

Tirta Adhi Soerjo berangkat ke pembuangan pada 18 Oktober 1910 dari Bogor menuju Pelabuhan Betawi, hanya ditemani RAA Prawiradiredja, Bupati Cianjur. Di Lampung, ia segera menjadi tempat warga mengadakan berbagai bentuk penganiayaan dan pemerasan oleh pejabat setempat. Kepekaannya terhadap ketidakadilan

mendorongnya kembali menulis, mengirimkan tulisannya ke surat kabar *Perniagaan* karena terlalu berisiko jika dimuat di *Medan Prijaji*. Kumpulan tulisannya yang kemudian dikenal sebagai “*Oleh-oleh dari Tempat Pembuangan*” yang menyingkap penyelewengan para pejabat dari tingkat kepala kampung hingga Residen Lampung.

Setelah kembali dari pengasingannya, Tirto langsung membenahi N.V. *Medan Prijaji* yang kondisinya cukup terbengkalai selama ditinggalkannya. Bersama *Medan Prijaji*, Tirto berambisi memukul aparat kolonial. Dari pembenahan itu dapat diketahui bahwa saham terbesar N.V. dimiliki Raden Ajoe Tirto Adhi Soerjo alias Siti Habibah, istri Tirto. Dalam rapat diputuskan, Tirto diangkat menjadi direktur menggantikan HM Arsad. Komisarisnya adalah Hadji Anang Tajib dan Hadji Amir, saudagar besar di Bandung. Kantor redaksi dan administrasinya di Bogor, sedangkan *Medan Prijaji* dicetak di percetakan HA Benjamins, Heerenstraat, Semarang (As’ad, 2012).

Tahun 1912 menjadi masa paling sulit bagi *Medan Prijaji* ketika perhatian Tirto terpecah oleh aktivitasnya di Sarekat Dagang Islam. Pada saat yang sama, Rinkes musuh utamanya menyusupkan mata-mata ke redaksi dan mengirim laporan bernada fitnah kepada Gubernur Jenderal Idenburg. Kontrak iklan dari perusahaan Eropa dibatalkan sehingga keuangan *Medan Prijaji* runtuh. Serangan politik, reputasi Tirto yang merosot, dan penolakan kredit dari pemodal Eropa semakin memperparah keadaan. Dalam kondisi terdesak, Tirto terpaksa meminjam dana dari surat kabar Sarotomo untuk mempertahankan kelangsungan surat kabar *Medan Prijaji*.

Memasuki bulan April 1912, surat kabar *Medan Prijaji* melaporkan kampanye Tirto untuk SDI di kota-kota besar. Namun tiba-tiba saja Tirto menghilang tanpa diketahui jejaknya. Setelah beberapa waktu baru terdengar kabar bahwa Tirto diculik, disandera oleh sejumlah orang dari *Vereniging van Ambtenaren bij het Binnenlandsch* (Perhimpunan Pegawai Pangreh Praja) karena Tirto tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Akibat dari semua itu menjadikan surat kabar *Medan Prijaji* mati untuk selama-lamanya, setelah pengadilan kolonial mendapat bahan secukupnya untuk menghentikan kegiatan surat kabar yang sudah ada sejak 1907. Pada 22 agustus 1912, N.V. *Medan Prijaji* dinyatakan pailit.

3. Isi Pemberitaan Surat Kabar *Medan Prijaji* yang Mengkritik Pemerintah Kolonial Hindia Belanda

Tirto menggunakan hukum untuk melakukan penilaian terhadap pemerintah Hindia-Belanda. Didapatinya berbagai penyelewengan kewenangan yang dilakukan aparat pemerintah Hindia-Belanda. Tirto kemudian melakukan berbagai kritik terhadap cara pemerintahan Hindia-Belanda, kritik dilakukan terhadap diri pejabat terendah (kelurahan) sampai dengan pejabat tertinggi (gubernur jenderal).

Pemberitaan dalam surat kabar *Medan Prijaji* menunjukkan pola kritik yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu kritik hukum, kritik sosial, kritik ekonomi, kritik birokrasi kolonial, dan kritik agraria. Kategorisasi tersebut memperlihatkan bahwa kritik Tirto Adhi Soerjo tidak bersifat sporadis, tetapi disusun sebagai bentuk perlawanan non-kekerasan yang sistematis melalui media pers. Bentuk perlawanan tersebut sejalan dengan konsep protes dan persuasi Gene Sharp (1973), khususnya melalui penggunaan kritik terbuka, pembentukan opini publik, penyebaran

kesadaran sosial, dan pengungkapan ketidakadilan kolonial melalui media komunikasi.

Berikut beberapa pemberitaan surat kabar *Medan Prijaji* yang mengkritik pemerintah kolonial:

Kritik Hukum

a. Perdelict: Umpatan (Tirta Adhi Soerjo Kontra A. Simon)

Dalam penerbitan surat kabar *Medan Prijaji* nomor 19 tahun 1909, Tirta Adhi Soerjo dengan bahasa yang blak-blakan membongkar skandal pejabat Indo-Eropa, Aspiran Kontrolir Purworejo bernama A. Somon. Simon telah melakukan persekongkolan jahat dengan Wedana Cangkreng, Purworejo, bernama Tjorosentono dalam mengangkat seorang lurah untuk Desa Bapangan, padahal lurah itu tidak disukai oleh warga. Bahkan jago lurah pilihan warga, Mas Soerodimedjo, malah ditangkap dan dihukum. Persoalan itu kemudian mendorong warga desa untuk menyampaikan keluhannya secara langsung melalui surat, yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Jawa, sebagaimana terlihat pada kutipan berikut:

“Putusan tuwan tidak adil sebab jago nomor 2 di angkat, jago nomor 1 tidak di angkat. Hamba 236 orang sanggup membayar. Silakan bagaimana kehendak paduka tuan. Dari orang-orang kecil Bapangan yang memohon keadilan. (Tandatangan-tandatangan)”.

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengangkatan lurah tidak hanya dipahami sebagai persoalan administratif, tetapi sebagai bentuk ketidakadilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pernyataan “*putusan tuwan tidak adil*” merupakan penilaian terbuka terhadap keputusan pejabat

yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan tertentu daripada kehendak masyarakat. Keberadaan 236 orang yang menyatakan dukungan juga memperlihatkan bahwa persoalan tersebut memiliki dampak sosial yang cukup luas.

Yang penting dari pemberitaan ini adalah bagaimana *Medan Prijaji* memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi kepada khalayak yang lebih luas. Masalah yang semula terjadi dalam lingkup pemerintahan lokal kemudian menjadi persoalan yang dapat diketahui media pers. Dengan cara tersebut, tindakan pejabat kolonial tidak lagi hanya berlangsung dalam ruang administrasi tertutup, tetapi dapat dinilai dan dikritik oleh masyarakat.

Dalam perspektif Gene Sharp (1973), pemberitaan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk protes yang diwujudkan melalui kritik terbuka terhadap kebijakan serta kewenangan pejabat kolonial. Bentuk protes tersebut tidak menggunakan tindakan kekerasan, tetapi diwujudkan melalui pengungkapan ketidakadilan dan artikulasi tuntutan atas keadilan melalui media pers. *Medan Prijaji* berperan sebagai ruang penyampaian protes yang memungkinkan persoalan dalam pemerintahan lokal diketahui oleh masyarakat secara lebih luas. Pemberitaan tersebut sekaligus menciptakan tekanan moral terhadap pihak yang memiliki kewenangan dengan mengangkat persoalan yang sebelumnya terbatas dalam lingkungan pemerintah lokal.

b. Oleh-Oleh dari Tempat Pembuangan

Tulisan “*Oleh-Oleh dari Tempat Pembuangan*” yang dimuat dalam surat kabar *Medan Prijaji* nomor 20, 21, 22, 23, dan 25 tahun 1910, muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dialami oleh penduduk pribumi, termasuk penulisnya, Tirta Adhi Soerjo, selama berada di

Telokbetoeng, Lampung. Melalui pengalaman langsung di tempat pembuangan, tulisan ini mengungkapkan bagaimana kekuasaan kolonial diterapkan secara sewenang-wenang, dengan mengabaikan perlindungan hukum dan menghimpit rakyat kecil dalam ketidakberdayaan. Kritik-kritik yang disampaikan diarahkan tidak hanya pada individu pejabat, tetapi juga pada sistem kolonial yang mendukung struktur penindasan tersebut. Hal tersebut terdapat dalam kutipan berikut:

“Pers selalu masih diikat, tidak boleh membuktikan kebenaran perkataannya, hingga bangsat-bangsat punya kelakuan tidak boleh dinyatakan pada orang banyak, kalau tidak berdasar pada surat autentik (vonnis dan sebagainya), sehingga dengan leluasa bangsat-bangsat itu melakukan perbuatannya.”

Kutipan tersebut menunjukkan kritik surat kabar *Medan Prijaji* terhadap regulasi pers kolonial yang membatasi kebebasan jurnalisme melalui prosedur pembuktian yang sangat formal. Pers tidak diberi keleluasaan mengungkap penyimpangan pejabat apabila tidak disertai dokumen resmi seperti *vonnis*, sehingga praktik penyalahgunaan kekuasaan sulit diketahui masyarakat luas. Pembatasan tersebut memperlihatkan bahwa hukum pers kolonial tidak sepenuhnya diarahkan untuk menjaga ketertiban publik, melainkan untuk melindungi kepentingan pemerintah dan aparatus kolonial dari kritik terbuka.

Tirta tidak sekedar menceritakan pengalaman pribadinya, tetapi menggunakan pengalaman tersebut untuk menjelaskan persoalan

yang lebih luas mengenai kebebasan pers. Pengalaman pembuangan menjadi dasar untuk memperlihatkan kepada pembaca bagaimana aturan pers dapat membatasi fungsi media sebagai alat pengawasan terhadap pemerintah. Tulisan tersebut mengarahkan pembaca untuk memahami hubungan antara kebebasan pers, kebenaran informasi, dan kepentingan masyarakat.

Penyampaian tersebut menunjukkan bentuk persuasi, karena Tirta berupaya membentuk pemahaman pembaca melalui argumentasi dan pengalaman yang berkaitan dengan pentingnya kebebasan pers dalam mengungkap persoalan publik. Dalam kerangka Gene Sharp (1973), pendekatan semacam ini dapat dipahami sebagai upaya memengaruhi cara pandang masyarakat tanpa mengarah pada tindakan langsung terhadap pejabat atau pihak yang berkuasa. Persuasi dilakukan dengan membangun kesadaran mengenai adanya pembatasan terhadap kebebasan pers serta konsekuensinya terhadap kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kritik Sosial

a. Sekolah Hakim dan Dokter

Tulisan “*Sekolahan Hakim dan Dokter*,” dalam surat kabar *Medan Prijaji* nomor 1 tahun 1910, muncul sebagai respons terhadap kebijakan kolonial Belanda yang membuka sekolah khusus untuk orang Eropa, terutama Indo-Eropa, dalam bidang kehakiman dan kedokteran. Kebijakan ini dianggap memperburuk ketimpangan pendidikan dan membatasi kesempatan pribumi untuk mengakses posisi-posisi profesional penting seperti hakim dan dokter. Selain itu, kualitas pendidikan yang diterima di Hindia dianggap lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan di Belanda. Surat kabar *Medan Prijaji* juga menekankan bahwa

peradilan yang melibatkan adat dan bahasa setempat lebih baik dilakukan oleh orang pribumi yang memahami konteks tersebut, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan lebih adil.

“Tuan Zaalberg sudah mengajak bangsanya Indo-Eropa memohon agar sekolah-sekolah dokter dan hakim dibuka untuk bangsa Eropa. Bagaimana sekarang, ketika hak bangsa yang diperintah masih sangat berbeda dengan bangsa yang memerintah, meskipun banyak di antara bangsa yang memerintah itu bersanak dengan bangsa yang diperintah.”

Kutipan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan hak berdasarkan kedudukan masyarakat dalam struktur kolonial. Istilah “*bangsa yang diperintah*” dan “*bangsa yang memerintah*” memperlihatkan hubungan sosial yang tidak setara antara bumiputra dan kelompok yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam pemerintahan kolonial. Pendidikan profesional dalam konteks tersebut bukan hanya persoalan pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan kesempatan untuk memperoleh kedudukan sosial dan administratif.

Tirto menggunakan persoalan pendidikan sebagai jalan untuk mempertanyakan dasar dari ketidaksetaraan tersebut. Jika masyarakat bumiputra tetap dibatasi dalam memperoleh pendidikan hakim dan dokter, maka keterbatasan tersebut akan mempertahankan ketergantungan mereka terhadap kelompok yang memiliki akses pendidikan lebih luas. Kritik Tirto karena itu mengandung gagasan bahwa kesetaraan pendidikan merupakan bagian dari persoalan

kedudukan masyarakat dalam sistem kolonial.

Cara penyampaian tersebut dapat dipahami melalui konsep persuasi Gene Sharp (1973), karena Tirto membangun kesadaran pembaca melalui argumentasi mengenai ketidakadilan akses pendidikan. Ia tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi mengarahkan pembaca untuk mempertanyakan kewajaran sistem pendidikan yang berbeda berdasarkan kedudukan sosial dan politik. Persuasi dalam konteks ini bekerja melalui penyadaran terhadap ketimpangan yang dianggap sebagai bagian dari struktur kolonial.

b. Deradjad Boemi Poetra

Tulisan “*Deradjat Boemi Poetra*” dalam surat kabar *Medan Prijaji* nomor 8 tahun 1910 mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap sistem kolonial yang secara sistematis menindas martabat dan hak-hak anak bumi putra. Ketidakadilan yang digambarkan dalam tulisan ini berakar pada perlakuan diskriminatif oleh bangsa Eropa terhadap pribumi, yang secara langsung merendahkan posisi sosial dan ekonomi mereka. Selain itu, tulisan ini juga mengkritik pembesar Jawa yang turut berperan dalam memperburuk kedudukan anak bumi putra, dengan menguatkan struktur hierarkis yang menghina dan menindas. Kritik yang tajam terhadap pengadilan kolonial yang tidak adil semakin mempertegas kondisi ketidaksetaraan yang dialami oleh pribumi, di mana hukum hanya berlaku untuk membenarkan kekuasaan penjajah dan bukan untuk keadilan. Hal ini tampak dalam kutipan dibawah ini:

“Kita selalu dijerumuskan ke dalam lembah kehinaan dan kesengsaraan, sehingga tenaga kita habis untuk menghindari dari bahaya. Sekian lamanya kita menjadi budak dan santapan bangsa yang sopan. Sungguh kuat sekali bangsa

kita menanggung siksaan, dengan sabar kita terpaksa menerima nasib yang tidak enak ini.”

Penggunaan kata “*kita*” dalam tulisan tersebut memiliki arti penting karena Tirto tidak menempatkan persoalan sebagai pengalaman individual, melainkan sebagai keadaan yang dialami bersama oleh masyarakat bumiputra. Sementara itu, istilah “*budak*” dan “*santapan*” menggambarkan hubungan yang sangat tidak seimbang antara pihak yang memiliki kekuasaan dan masyarakat yang berada dalam posisi subordinat. Bahasa tersebut memperkuat gambaran mengenai penderitaan yang dialami masyarakat akibat hubungan sosial kolonial.

Tulisan tersebut juga tidak berhenti pada penggambaran penderitaan. Tirto berusaha membangun kesadaran pembaca mengenai kondisi masyarakatnya sendiri. Dengan mengangkat pengalaman sosial ke dalam ruang publik, penderitaan yang sebelumnya dianggap sebagai keadaan yang harus diterima mulai dipersoalkan sebagai akibat dari hubungan kekuasaan yang tidak seimbang.

Penggambaran mengenai penderitaan rakyat dimanfaatkan sebagai strategi persuasi untuk menumbuhkan empati, solidaritas, serta kesadaran politik di kalangan masyarakat bumiputra terhadap realitas penindasan yang mereka hadapi. Tirto tidak hanya menyajikan kondisi kesengsaraan rakyat, tetapi juga berusaha membentuk perspektif pembaca dalam memahami kolonialisme sebagai salah satu sumber ketidakadilan sosial. Pemanfaatan

argumentasi moral dan pengaruh psikologis dalam membentuk pandangan masyarakat tersebut dapat ditempatkan dalam pemikiran Gene Sharp (1973) mengenai persuasi, yang menekankan upaya memengaruhi opini publik melalui pembentukan kesadaran tanpa melibatkan penggunaan kekerasan fisik.

c. *Kemerdikaan Orang Ketjil*

Rubrik “*Kemerdikaan Orang Ketjil*” dalam surat kabar *Medan Prijaji* nomor 11 tahun 1910, dapat dilihat sebagai reaksi terhadap kebijakan kolonial yang menindas rakyat kecil di bawah pemerintahan Belanda. Surat kabar *Medan Prijaji* mencatat berbagai bentuk penindasan yang dialami oleh masyarakat desa, mulai dari perintah tanam paksa, kewajiban memelihara ternak, hingga ancaman hukuman bagi yang tidak mampu mematuhi peraturan. Kritik ini muncul dalam konteks ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh rakyat kecil, yang terperangkap dalam sistem kolonial yang hanya mengutamakan kepentingan kelompok penguasa. Tulisan ini menggambarkan ketimpangan dalam hubungan kekuasaan antara rakyat dengan pejabat kolonial yang lebih mementingkan keuntungan pribadi ketimbang kesejahteraan rakyat. Hal ini tampak dalam kutipan:

“Mereka mempunyai pendapat bahwa adanya si kecil untuk kehidupan si besar. Maka dari besarnya sangkaan itu, banyak pembesar yang tidak suka ambil peduli akan kesusahan, keberatan, dan kesengsaraan si kecil, yang diperlukan hanya kesenangannya sendiri. Orang lain tidak peduli, asal dirinya sampai senang hidupnya, cukuplah sudah.”

Istilah “*si kecil*” dan “*si besar*” menggambarkan pembagian sosial berdasarkan kekuasaan dan kedudukan. Masyarakat kecil ditempatkan sebagai pihak yang harus menopang kepentingan kelompok yang lebih kuat. Kritik Tirto tidak hanya diarahkan kepada kebijakan

tertentu, tetapi juga kepada cara pandang yang menganggap penderitaan masyarakat kecil sebagai sesuatu yang wajar demi kepentingan kelompok yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

Pemberitaan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan sosial dipahami sebagai persoalan hubungan antarkelompok. Tirta mengajak pembaca melihat bahwa kesulitan masyarakat kecil tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan sikap kelompok yang memiliki kekuasaan terhadap mereka. Kritik tersebut sekaligus memperkuat perhatian terhadap kepentingan masyarakat yang berada pada posisi lemah.

Narasi tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk menyampaikan kritik terhadap para pembesar, tetapi juga berupaya membangun empati dan solidaritas pembaca terhadap keadaan masyarakat yang mengalami penindasan. Penggunaan argumentasi moral dan pengaruh psikologis dalam membentuk opini publik dapat ditempatkan dalam pemikiran Gene Sharp (1973) mengenai persuasif, yang menekankan upaya menumbuhkan kesadaran kolektif melalui pengaruh terhadap cara pandang masyarakat tanpa melibatkan penggunaan kekerasan fisik.

Kritik Ekonomi

a. *Wong Tjilik Kedjepit Sampe Mendelik*

Rubrik “*Wong Tjilik Ketjepit Sampe Mendelik*” yang dimuat berseri dalam surat kabar *Medan Prijaji* nomor 11, 12, dan 14 tahun 1910, muncul sebagai respons terhadap kemiskinan dan ketidakadilan yang dialami rakyat kecil akibat sistem kolonial Belanda. Dengan menggunakan bahasa satir,

tulisan ini mengkritik keras praktik eksploitasi ekonomi, politik, dan sosial yang memperburuk kondisi kehidupan rakyat. Hal pertama yang disoroti surat kabar *Medan Prijaji* adalah gambaran kemelaratan rakyat yang dianggap sebagai “*penjakit*” yang merusak kehidupan mereka. Hal ini tampak dalam kalimat berikut:

“Penyakit yang sangat mengganggu dan sangat mudah merusakkan badan, yaitu kemelaratan. Di mana kita lewat, maka terdengarlah ratap dan tangis; mereka itu yang menyatakan susah dan sukarnya mencari penghidupan, baik berkuli, menumpang, berdagang, bercocok tanam, dan sebagainya.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan rakyat dipahami bukan sebagai keadaan alamiah, melainkan sebagai akibat langsung dari struktur ekonomi kolonial yang eksploitatif dan tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat bumiputra. Penggunaan ungkapan “*ratap dan tangis*” merepresentasikan penderitaan kolektif rakyat kecil yang hidup dalam tekanan ekonomi berkepanjangan, sementara penyebutan berbagai jenis pekerjaan berupah rendah memperlihatkan sempitnya akses masyarakat terhadap sumber penghidupan yang layak. Kemelaratan digambarkan sebagai “*penyakit*” yang merusak kehidupan sosial masyarakat, sehingga kritik yang disampaikan tidak hanya diarahkan pada kondisi ekonomi rakyat, tetapi juga pada kegagalan pemerintah kolonial dalam menciptakan kesejahteraan sosial.

Kritik yang disampaikan Tirta dapat dipahami sebagai metode protes dalam kerangka perlawanan nonkekerasan Gene Sharp (1973). Bentuk perlawanan ini dilakukan melalui kritik terbuka terhadap dampak kebijakan kolonial di ruang publik.

Tirto Adhi Soerjo menggunakan narasi penderitaan rakyat untuk membangun kesadaran sosial sekaligus mempertanyakan legitimasi moral pemerintah kolonial yang membiarkan kemiskinan berlangsung secara sistematis. *Medan Prijaji* tidak hanya menyampaikan kondisi kemelaratan rakyat, tetapi juga menjadikan pengalaman sosial masyarakat bumiputra sebagai bentuk protes ideologis terhadap struktur kolonial yang menindas.

Kritik Birokrasi Kolonial

a. Siapa Makan Tjabe Dialah jang Kepedesan

Tulisan "*Siapa Makan Tjabe Dialah jang Kepedesan*" dalam surat kabar *Medan Prijaji* nomor 10 tahun 1910, menjadi bentuk kritik tajam terhadap perilaku buruk ini, di mana pejabat-pejabat kolonial yang seharusnya menjadi panutan malah terlibat dalam hubungan simbiosis yang saling menguntungkan dengan sesama mereka, termasuk dalam praktik suap dan perlindungan terhadap tindakan tidak terpuji.

"Orang menyebut bupati itu suka makan 'oosoer' (suap). Karena itu priyayi tidak merasa bodoh atau jahat, hanya merasa pintar dan adil saja, seperti dalam peribahasa Sunda: 'Seekor kutu di tempat terang milik orang lain terlihat, tetapi gajah di tempat terang miliknya sendiri tidak terasa.'"

Kutipan tersebut menunjukkan kritik tajam Tirto Adhi Soerjo terhadap mentalitas birokrasi kolonial yang dipenuhi praktik korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan budaya feodal di kalangan priyayi maupun pejabat lokal. Sindiran mengenai

pejabat yang gemar menerima "oosoer" (suap) memperlihatkan bahwa jabatan dalam struktur kolonial tidak lagi dipahami sebagai amanah administratif, melainkan sebagai sarana mempertahankan kepentingan pribadi dan status sosial. Kritik ini juga menyingkap kecenderungan aparat kolonial untuk menutupi kegagalan dan kesalahan mereka melalui sikap defensif serta penyalahgunaan kekuasaan terhadap pihak lain.

Penggunaan satire dan peribahasa dalam tulisan tersebut menunjukkan adanya strategi protes non-kekerasan yang diterapkan Tirto melalui *Medan Prijaji*. Kritik terhadap pemerintahan kolonial tidak diwujudkan melalui tindakan fisik, melainkan dengan mengungkap berbagai persoalan dan keburukan dalam birokrasi kolonial kepada publik. Penyampaian kritik tersebut bertujuan membangun kesadaran masyarakat mengenai praktik ketidakadilan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda. Praktik tersebut dapat ditempatkan dalam kategori protest sebagaimana dikemukakan Gene Sharp (1973), khususnya melalui kecaman terhadap tindakan penguasa dan penggunaan sindiran politik sebagai sarana untuk mempertanyakan serta mengurangi legitimasi moral pemerintahan kolonial.

b. Koloniale Politiek

Rubrik "*Koloniale Politiek*" dalam surat kabar *Medan Prijaji* nomor 14 tahun 1910, muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan politik kolonial Belanda yang semakin menindas. Pada awal abad ke-20, Hindia Belanda menghadapi ketegangan sosial yang meningkat akibat pengaruh kebijakan kolonial yang memelihara sistem feodal, diskriminatif, dan memonopoli kekuasaan. Melalui rubrik *Koloniale Politiek*, surat kabar *Medan Prijaji* memberikan kritik tajam terhadap stagnasi politik yang

dipertahankan Belanda, serta dampak buruk yang ditimbulkannya terhadap kehidupan sosial-ekonomi pribumi. Penulis surat kabar ini yaitu Tirto Adhi Soerjo menyoroti betapa sistem kolonial Belanda lebih mengutamakan kepentingan kekuasaan dan ekonomi, daripada memperkenalkan perubahan yang dapat memberikan manfaat bagi rakyat pribumi. Hal ini tampak pada kutipan berikut:

“Dimulai dari aturan daerah jajahan yang merdeka yang dilakukan oleh Inggris, berdirilah politik kolonial Belanda yang konservatif itu. Kemudian dinyatakan penguatannya dengan tegas aturan-aturan yang diterimanya dari orang lain, diterima dari suatu rakyat pada suatu masa, ketika pemeliharaan negeri diserahkan karena kecurigaan. Hampir tidak ada tanah di seluruh dunia ini, barangkali dengan pengecualian Cina di mana banyak tersimpan aturan-aturan asal, selain di Hindia Belanda.”

Kutipan tersebut memperlihatkan kritik Tirto Adhi Soerjo terhadap karakter politik kolonial Belanda yang mempertahankan sistem pemerintahan lama secara kaku dan represif. Pemerintah kolonial digambarkan tidak melakukan pembaruan administrasi yang berpihak pada kebutuhan masyarakat pribumi, tetapi justru mempertahankan aturan-aturan warisan kolonial sebagai instrumen kontrol kekuasaan. Penyebutan Hindia Belanda sebagai wilayah yang masih menyimpan “*aturan-aturan asal*” merupakan bentuk sindiran terhadap pemerintahan kolonial yang mempertahankan sistem konservatif demi menjaga dominasi politik dan ekonomi atas masyarakat bumiputra.

Kritik tersebut dapat dipahami sebagai metode protes dalam perlawanan non-kekerasan menurut

Gene Sharp (1973), yang ditunjukkan melalui penolakan terbuka terhadap legitimasi kebijakan kolonial. *Medan Prijaji* tidak hanya menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintahan kolonial, tetapi juga membangun kesadaran publik mengenai stagnasi politik dan hukum sebagai bagian dari upaya mempertahankan relasi kekuasaan yang timpang. Bahasa satir dan kritik langsung memperlihatkan pemanfaatan pers oleh Tirto sebagai ruang perlawanan ideologis untuk menggugat otoritas kolonial secara moral dan intelektual.

Kritik Agraria

a. *Apa jang Goev Kata dan Apa jang Goev Bikin*

Tulisan bertajuk “*Apa jang Gouv kata dan apa jang Gouv bikin*” dalam surat kabar *Medan Prijaji* nomor 17 tahun 1910, muncul karena ketegangan politik pasca-Perang Diponegoro, yang melibatkan pemerintah kolonial Belanda dan kerajaan-kerajaan Jawa. Setelah perang, Belanda mengajukan biaya perang yang sangat tinggi kepada Sultan Yogyakarta dan kerajaan-kerajaan lainnya, yang akhirnya dipandang sebagai bentuk pemaksaan dan tekanan untuk menyerahkan tanah sebagai kompensasi. Selain itu, janji politik yang sering diingkari oleh pihak kolonial dan campur tangan mereka dalam urusan internal kerajaan, seperti dalam penunjukan putra mahkota, memicu kemarahan dan kritik tajam dari *Medan Prijaji*. Hal tersebut terdapat dalam tulisan di bawah ini:

“Ongkos perang (25 juta rupiah perak) yang akan dipikul oleh Sultan Yogyakarta begitu tinggi, sehingga masuknya uang itu tidak bisa diduga-dugakan, boleh dipastikan tidak bisa diperbuat. Karena itu dimintanya menyerahkan tanah daerah, juga karena hal-hal politik. Untuk membayar kerugian perang itu maka Sultan-sultan Yogyakarta hendaklah

menyerahkan bagian besar dari tanah daerahnya.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan “*ongkos perang*” digunakan pemerintah kolonial bukan semata sebagai mekanisme administratif, melainkan sebagai instrumen politik untuk memperluas kontrol terhadap wilayah kerajaan di Jawa. Beban pembayaran yang sangat besar memperlihatkan bahwa tuntutan tersebut sejak awal sulit dipenuhi, sehingga penyerahan tanah menjadi konsekuensi yang hampir tidak dapat dihindarkan. Persoalan ini mencerminkan praktik dominasi kolonial yang memanfaatkan legitimasi hukum dan kebijakan ekonomi untuk melemahkan kedaulatan politik kerajaan pribumi secara bertahap.

Pemberitaan dalam *Medan Prijaji* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk metode protes dalam kerangka perlawanan non-kekerasan yang dijelaskan oleh Gene Sharp (1973), khususnya melalui pengungkapan praktik ketidakadilan kolonial kepada masyarakat luas. Tirto Adhi Soerjo tidak sekadar menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda, tetapi juga berupaya membentuk kesadaran pembaca mengenai praktik penguasaan tanah yang berlangsung melalui tekanan politik dan dikonstruksikan seolah-olah sebagai kewajiban administratif. Pemanfaatan media pers tersebut menjadi strategi untuk membangun penilaian kritis terhadap legitimasi moral kekuasaan kolonial tanpa melibatkan tindakan perlawanan secara fisik.

b. Tanah-Tanah Partikelir di Jawa

Tulisan berjudul “*Tanah-Tanah Partikulier di Djawa*” dalam surat kabar *Medan Prijaji* nomor 18 tahun 1910, muncul karena didorong oleh kebijakan agraria kolonial Belanda yang membuka ruang bagi pengalihan tanah kepada modal asing, khususnya Inggris, tanpa adanya perlindungan bagi penduduk pribumi. Kebijakan ini menyebabkan penyerahan tanah dalam jumlah besar, yang tidak hanya mengancam kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mengurangi kedaulatan mereka atas tanah adat. Surat kabar ini berfungsi sebagai suara penentang yang kritis terhadap praktik eksploitasi ekonomi yang menguntungkan pihak asing, sementara penduduk pribumi semakin terpinggirkan. Penggunaan angka dan data konkret mengenai luas tanah dan jumlah penduduk bertujuan untuk menggambarkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut:

“Dalam penantian, keadaan bukan saja tidak berubah, tetapi malah menjadi tidak baik, sebab pandangannya Tuan Faes sudah mengucapkannya seperti menjadi advokatnya orang-orang yang mempunyai tanah-tanah partikelir itu melawan kepentingannya penduduk anak negeri. Sedangkan pemerintah seolah-olah tidak berkuasa akan mencegah kesukaannya tuan-tuan tanah yang ingat kepentingan sendiri dan congkak serta berpengaruh.”

Kutipan tersebut memperlihatkan kritik *Medan Prijaji* terhadap struktur kekuasaan kolonial yang dinilai berpihak pada kepentingan pemilik tanah partikelir dan mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat pribumi. Penduduk “anak negeri” digambarkan berada dalam posisi yang lemah karena aparat pemerintahan yang seharusnya menjalankan fungsi perlindungan justru bekerja sebagai perpanjangan kepentingan tuan tanah.

Penyebutan Tuan Faes sebagai sosok yang bertindak layaknya “*advokat*” pemilik tanah menunjukkan adanya keberpihakan birokrasi kolonial terhadap kelompok pemilik modal serta kegagalan pemerintah menjaga keadilan bagi rakyat pribumi. Kritik tersebut juga menegaskan bahwa relasi antara pemerintah kolonial dan pemilik tanah partikelir tidak bersifat netral, melainkan saling menopang dalam mempertahankan dominasi ekonomi dan politik atas masyarakat bumiputra.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa masalah agraria tidak dapat dipisahkan dari persoalan kekuasaan. Penguasaan tanah memberikan keuntungan ekonomi sekaligus pengaruh politik kepada kelompok tertentu, sementara penduduk yang tinggal dan bekerja di wilayah tersebut berada dalam posisi yang lebih rentan. Tirto menggunakan media untuk membuka hubungan antara kepentingan pemilik tanah dan tindakan pemerintah yang dianggap tidak cukup melindungi masyarakat.

Kritik Tirto Adhi Soerjo melalui Medan Prijaji dapat dikategorikan sebagai metode protes dalam perlawanan non-kekerasan menurut Gene Sharp (1973). Kritik disampaikan dengan mengungkap ketidakadilan agraria dan penyalahgunaan kekuasaan kepada publik untuk menunjukkan ketimpangan dalam sistem kolonial. Bahasa yang tegas terhadap pejabat kolonial dan tuan tanah partikelir juga digunakan untuk melemahkan legitimasi moral pemerintah serta membangun kesadaran masyarakat mengenai kegagalannya melindungi rakyat pribumi.

Respons pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap kritik yang

dimuat dalam *Medan Prijaji* cenderung defensif dan represif karena kritik tersebut dipandang mengancam stabilitas kekuasaan kolonial. Pemerintah tidak hanya mempertahankan sistem yang menguntungkan golongan Eropa dan Indo-Eropa, tetapi juga memperkuat pengawasan, sensor, serta pembatasan terhadap kebebasan pers untuk mengendalikan arus informasi dan opini publik. Sikap tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis dalam mempertahankan hegemoni kolonial melalui legitimasi hukum dan wacana pembangunan yang menutupi praktik diskriminasi, eksploitasi ekonomi, dan ketidakadilan sosial terhadap masyarakat pribumi. Kritik yang dimuat dalam *Medan Prijaji* juga memperlihatkan pola perlawanan non-kekerasan yang terorganisasi melalui metode potres dan persuasi sebagaimana dikemukakan Gene Sharp (1973). Tirto Adhi Soerjo memanfaatkan pers sebagai ruang produksi wacana kritis untuk membangun kesadaran kolektif bumiputra, menggugat legitimasi moral pemerintah kolonial, serta membuka berbagai persoalan ketidakadilan hukum, ekonomi, dan sosial ke ruang publik.

Pembahasan

1. Perlawanan Tirto Adhi Soerjo Melalui Surat Kabar *Medan Prijaji* Terhadap Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (1907-1910)

Perlawanan Tirto Adhi Soerjo melalui *Medan Prijaji* tidak lahir secara spontan, melainkan berkembang dari pengalaman sosial dan kesadaran kritis terhadap ketidakadilan dalam strukrur kolonial Hindia Belanda. Ketidakadilan tersebut tampak dalam pembatasan akses pendidikan, diskriminasi hukum, penyalahgunaan kewenangan birokrasi, serta berbagai persoalan ekonomi dan agrarian yang memengaruhi kehidupan masyarakat bumiputra. Dalam kondisi Ketika

pemerintah kolonial memiliki kekuatan militer dan birokrasi yang jauh lebih besar, Tirta menggunakan pers sebagai ruang untuk menyampaikan kritik dan memengaruhi cara masyarakat memandang persoalan kolonial. Pendirian *Medan Prijaji* pada 1907 menjadi bagian penting dari strategi tersebut karena surat kabar memungkinkan kritik terhadap persoalan yang sebelumnya bersifat lokal untuk disampaikan kepada khalayak yang lebih luas.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa penggunaan pers oleh Tirta tidak hanya dapat dipahami sebagai kegiatan jurnalistik, tetapi juga sebagai praktik perlawanan non-kekerasan. Isi pemberitaan *Medan Prijaji* memperlihatkan dua kecenderungan utama, yaitu protes dan persuasi. Perbedaan keduanya dalam penelitian ini tidak hanya didasarkan pada tema tulisan, tetapi pada tujuan komunikatif dan cara kritik disampaikan. Tulisan dikategorikan sebagai protes apabila tekanan utamanya terletak pada pengungkapan, penolakan, atau pengecaman secara terbuka terhadap tindakan, kebijakan, atau praktik kekuasaan kolonial. Sebaliknya, tulisan dikategorikan sebagai persuasi apabila tekanan utamanya terletak pada usaha membentuk pemahaman, sikap, dan kesadaran pembaca terhadap suatu persoalan. Perbedaan ini penting karena satu tulisan yang sama-sama kritis tidak otomatis memiliki fungsi perlawanan yang sama.

Pembedaan tersebut juga menjelaskan mengapa penelitian ini tidak menempatkan tulisan-tulisan Tirta sebagai *symbolic action*. Dalam klasifikasi Gene Sharp, surat kabar dan jurnal termasuk bentuk komunikasi kepada khalayak luas dalam kelompok *nonviolent protest and persuasion*, sedangkan tindakan simbolik

publik merupakan bentuk tindakan lain yang menggunakan simbol, pertunjukan, atau tindakan publik untuk menyampaikan penolakan. Tulisan-tulisan yang dianalisis dalam penelitian ini bekerja terutama melalui argumentasi, pengungkapan fakta, kritik, satire, dan pembentukan opini, bukan melalui tindakan simbolik publik. Yang menjadi kekuatan perlawanan Tirta bukan simbol atau aksi massa secara langsung, melainkan kemampuan pers untuk menjadikan kritik sebagai komunikasi politik kepada masyarakat.

a. Perlawanan Menggunakan Metode Protes

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode protes digunakan Tirta. Ketika pemberitaan diarahkan untuk memperlihatkan adanya kesalahan, ketidakadilan, atau penyalahgunaan kekuasaan secara terbuka. Pola tersebut tampak dalam *Perdelict: Umpatan, Siapa Makan Tjabe Dialah jang Kepedesan, Wong Tjilik Kedjepit Sampe Mendelik, Koloniale Politiek, Apa jang Goev Kata dan Apa jang Goev Bikin*, serta *Tanah-Tanah Partikelier di Djawa*. Meskipun objek kritiknya berbeda, keenam tulisan tersebut memiliki persamaan dalam cara menghadirkan persoalan ke ruang publik. Tirta tidak sekedar menggambarkan keadaan, tetapi memberikan penilaian terhadap tindakan pejabat, kebijakan kolonial, kemiskinan, penyalahgunaan kekuasaan, dan persoalan agrarian. Kritik tersebut membuat tindakan pemerintah dan aparat kolonial dapat dinilai oleh pembaca di luar lingkungan administratif tempat persoalan itu terjadi.

Kategorisasi sebagai protes, bukan persuasi, dapat dilihat dari posisi komunikasi dalam tulisan-tulisan tersebut. Pada *Perdelict: Umpatan*, misalnya, persoalan pengangkatan lurah di Bapangan diposisikan sebagai keputusan yang tidak

adil. Dalam *Siapa Makan Tjabe Dialah jang Kepedesan*, praktik suap dan perilaku priyayi dikritik melalui satire. Sementara itu, *Koloniale Politiek* mengarahkan kritik kepada kebijakan kolonial yang dianggap mempertahankan aturan lama. Ketiganya memiliki sasaran kritik yang jelas dan secara langsung mempertanyakan tindakan atau kewenangan pihak yang dikritik. Begitu pula *Wong Tjilik Kedjepit Sampe Mendelik* yang mengangkat kemelaratan sebagai persoalan yang perlu diketahui publik, serta tulisan agraria yang mengkritik hubungan pemerintah dengan pemilik tanah. Ciri utamanya bukan semata-mata penggunaan bahasa keras, tetapi adanya ekspresi penolakan dan pengungkapan ketidakadilan kepada khalayak.

Dalam perspektif Gene Sharp (1973), karakter tersebut sesuai dengan fungsi *nonviolent protest and persuasion*, khususnya ketika komunikasi publik digunakan untuk menyatakan penolakan terhadap kondisi yang dianggap tidak adil. Sharp menempatkan surat kabar dan jurnal sebagai salah satu metode komunikasi kepada khalayak luas. Akan tetapi, dalam penelitian ini fungsi pers tersebut lebih spesifik bekerja sebagai protes karena isi pemberitaan tidak berhenti pada upaya membuat pembaca memahami suatu persoalan, tetapi juga secara terbuka mengemukakan praktik kekuasaan yang menjadi sumber persoalan. Penggunaan satire, kritik langsung, pengungkapan kasus, dan penilaian moral terhadap pejabat memperkuat fungsi tersebut. Jadi, klasifikasi protes didasarkan pada arah tindakan komunikatifnya, yaitu menyatakan penolakan dan

mempertanyakan legitimasi tindakan kekuasaan melalui ruang publik.

Temuan tersebut memperluas penelitian Setyowati (2003) yang melihat perlawanan Tirta terhadap pemerintah Belanda. Jika penelitian sebelumnya menekankan keberadaan perlawanan Tirta, penelitian ini memperlihatkan mekanisme komunikasi yang digunakan untuk menjalankan perlawanan tersebut. Kritik Tirta tidak hanya menunjukkan bahwa ia berseberangan dengan pemerintah kolonial, tetapi juga memperlihatkan bagaimana surat kabar digunakan untuk membawa penyalahgunaan kekuasaan, persoalan hukum, kemiskinan, dan persoalan agraria ke ruang publik. Penelitian ini memberikan penjelasan lebih spesifik mengenai bentuk perlawanan non-kekerasan yang sebelumnya belum menjadi fokus utama.

b. Perlawanan Menggunakan Metode persuasi

Berbeda dengan tulisan yang dikategorikan sebagai protes, metode persuasi dalam *Medan Prijaji* lebih menekankan perubahan cara pandang pembaca terhadap kondisi masyarakat dan struktur kolonial. Pola tersebut terlihat dalam *Sekolahan Hakim dan Dokter*, *Deradjad Boemi Poetra*, *Kemerdikaan Orang Ketjil*, dan *Oleh-Oleh dari Tempat Pembuangan*. Keempat tulisan tersebut tidak dibangun untuk mengemukakan suatu tindakan tertentu, tetapi untuk memberikan penjelasan, pengalaman, dan argumentasi mengenai ketidaksetaraan pendidikan, penderitaan masyarakat bumiputra, kedudukan rakyat kecil, serta pembatasan terhadap pers.

Alasan tulisan tersebut dikategorikan sebagai persuasi, bukan protes, terletak pada sasaran utama komunikasinya. Dalam *Sekolahan Hakim dan Dokter*, misalnya, Tirta mengajak pembaca mempertanyakan mengapa kesempatan pendidikan

profesional dibedakan antara bangsa yang memerintah dan bangsa yang diperintah. Dalam *Deradjad Boemi Poetra*, penggunaan kata “*kita*” membangun kesadaran bersama mengenai penderitaan bumiputra. *Kemerdikaan Orang Ketjil* mengajak pembaca memahami hubungan antara kepentingan “*si besar*” dan penderitaan “*si kecil*”, sedangkan *Oleh-Oleh dari Tempat Pembuangan* menggunakan pengalaman Tirto untuk memperlihatkan persoalan kebebasan pers. Kekuatan tulisan-tulisan tersebut berada pada upaya memengaruhi pemahaman dan sikap pembaca, bukan terutama pada tindakan mengecam sasaran tertentu.

Perbedaan ini menjadi penting karena kritik yang bersifat keras belum tentu merupakan protes. Persuasi dapat menggunakan bahasa yang emosional atau argumentative, tetapi orientasi utamanya adalah mengubah cara pembaca memahami suatu persoalan. Gene Sharp (1973) memasukkan komunikasi kepada khalayak luas sebagai bagian dari metode *nonviolent protest and persuasion*, sehingga surat kabar dapat menjadi sarana untuk memengaruhi sikap publik. Dalam kasus Tirto, fungsi tersebut terlihat ketika pengalaman, argumentasi, dan Gambaran penderitaan digunakan untuk membangun kesadaran pembaca. Klasifikasi persuasi dalam penelitian ini tidak berarti tulisan tersebut kurang kritis dibandingkan protes, melainkan menunjukkan bahwa mekanisme perlawanannya bekerja melalui perubahan kesadaran.

Temuan ini memperkuat penelitian Mulyadi (2021) yang menempatkan *Medan Prijaji* sebagai media yang berperan dalam

pertumbuhan kesadaran nasional. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menjelaskan proses yang menghasilkan kesadaran tersebut. Kesadaran tidak hanya terbentuk karena *Medan Prijaji* berbicara mengenai nasionalisme, tetapi juga melalui pemberitaan yang membuat pembaca mengenali ketidakadilan hukum, pendidikan, sosial, ekonomi, dan birokrasi sebagai persoalan bersama. Persuasi menjadi mekanisme yang menghubungkan kritik terhadap persoalan sehari-hari dengan pembentukan kesadaran kolektif.

Jika dibandingkan dengan protes, persuasi juga memperlihatkan bahwa strategi Tirto tidak hanya diarahkan kepada pemerintah kolonial. Pemerintah memang menjadi sasaran kritik, tetapi masyarakat bumiputra juga menjadi sasaran penting karena perubahan yang diharapkan terlebih dahulu berkaitan dengan perubahan cara masyarakat memahami dirinya dan kedudukannya. Hal tersebut menjelaskan mengapa penggunaan bahasa yang membangun rasa “*kita*”, penggambaran penderitaan rakyat, serta argumentasi mengenai hak pendidikan dan kebebasan pers menjadi penting. Perlawanan melalui pers dengan demikian tidak hanya berusaha menentang kekuasaan, tetapi juga membentuk subjek yang mampu menyadari ketidakadilan tersebut.

2. Hasil Perlawanan Tirto Adhi Soerjo Melalui Surat Kabar Medan Prijaji Terhadap Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (1907-1910)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlawanan Tirto melalui *Medan Prijaji* tidak menghasilkan perubahan langsung terhadap kebijakan pemerintah kolonial dalam bidang hukum, pendidikan, ekonomi, maupun agraria. Keterbatasan tersebut berkaitan dengan kuatnya struktur kekuasaan kolonial dan terbatasnya daya paksa pers dalam

memengaruhi keputusan pemerintah. Respons terhadap kritik Tirto justru terlihat melalui proses hukum, pengawasan terhadap aktivitas pers, dan pembuangan Tirto ke Telokbetung. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlawanan non-kekerasan tidak selalu dapat diukur dari keberhasilan mengubah kebijakan secara langsung.

Dalam perspektif Gene Sharp (1973), perlawanan non-kekerasan juga bekerja melalui kekuatan sosial dan politik yang dibangun tanpa penggunaan kekerasan. Dalam kasus *Medan Prijaji*, kekuatan tersebut terlihat dari kemampuan pers membawa tindakan dan kebijakan pemerintah kolonial ke ruang publik sehingga dapat diketahui dan dinilai oleh masyarakat. Kritik terhadap persoalan hukum, birokrasi, ekonomi, pendidikan, dan agrarian membuat otoritas kolonial tidak hanya dipandang sebagai kekuasaan administrative, tetapi juga menjadi objek kritik dan penilaian moral.

Hasil perlawanan Tirto dapat dibedakan menjadi hasil langsung dan hasil tidak langsung. Hasil langsung berupa perubahan kebijakan kolonial memang tidak terlihat secara kuat dalam penelitian ini. Sebaliknya, hasil tidak langsung tampak melalui terbentuknya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, berkembangnya kritik terhadap tindakan pemerintah, serta munculnya kesadaran bahwa berbagai ketidakadilan yang dialami masyarakat bukan sekadar persoalan individual, tetapi berkaitan dengan struktur kolonial.

Temuan ini memperkuat penelitian Mulyadi (2021) yang menempatkan *Medan Prijaji* sebagai media yang berperan dalam pertumbuhan kesadaran nasional. Penelitian ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proses terbentuknya kesadaran tersebut melalui

pemberitaan tentang ketidakadilan hukum, pendidikan, ekonomi, birokrasi, dan agraria. Temuan ini juga melengkapi penelitian Setyowati (2003) mengenai perlawanan Tirto terhadap pemerintah Belanda dengan menunjukkan bahwa perlawanan tersebut dijalankan melalui mekanisme komunikasi yang dapat dibedakan menjadi protes dan persuasi.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada pembacaan isi pemberitaan *Medan Prijaji* sebagai praktik perlawanan non-kekerasan berdasarkan perspektif Gene Sharp. Kritik hukum, sosial, ekonomi, birokrasi kolonial, dan agrarian tidak hanya digunakan sebagai bukti penolakan Tirto terhadap pemerintah kolonial, tetapi dianalisis berdasarkan fungsi komunikatifnya. Protes bekerja melalui pengungkapan dan penolakan terbuka terhadap praktik kekuasaan, sedangkan persuasi bekerja melalui pembentukan pemahaman dan kesadaran pembaca terhadap ketidakadilan. *Medan Prijaji* tidak hanya berfungsi sebagai media nasionalisme, tetapi juga instrument perlawanan yang menggunakan komunikasi publik untuk menentang dominasi kolonial tanpa kekerasan.

SIMPULAN

Perlawanan Tirto Adhi Soerjo melalui surat kabar *Medan Prijaji* pada periode 1907-1910 menunjukkan bentuk perlawanan non-kekerasan melalui strategi protest dan persuasion sebagaimana dikemukakan Gene Sharp (1973). Melalui kritik terhadap persoalan hukum, sosial, ekonomi, birokrasi kolonial, dan agraria, Tirto memanfaatkan pers untuk membangun opini publik, menyebarkan kesadaran politik, serta menggugat legitimasi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Meskipun tidak menghasilkan perubahan kebijakan secara langsung, perlawanan tersebut berperan dalam membentuk

kesadaran kritis masyarakat bumiputra dan memperkuat perkembangan nasionalisme awal melalui produksi wacana antikolonial di ruang publik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pers bumiputra tidak hanya berfungsi sebagai media informasi dan penyebaran gagasan nasionalisme, tetapi juga sebagai instrumen perlawanan non-kekerasan berbasis wacana. Implikasinya, penelitian ini memperluas historiografi pers kolonial dengan menempatkan praktik jurnalistik sebagai bagian dari strategi perlawanan non-kekerasan melalui protes dan persuasi, sekaligus memperlihatkan bahwa perlawanan terhadap kolonialisme tidak hanya dilakukan melalui gerakan politik atau perjuangan fisik, tetapi juga melalui produksi wacana, kritik publik, dan pembentukan kesadaran masyarakat.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai praktik perlawanan non-kekerasan pada surat kabar bumiputra lainnya. Kajian terhadap *Oetoesan Hindia*, misalnya, dapat dilakukan untuk melihat persamaan dan perbedaan strategi protes dan persuasi yang digunakan dalam menghadapi kekuasaan kolonial. Penelitian komparatif antarsurat kabar dan antarwilayah di Hindia Belanda juga dapat memperluas pemahaman mengenai hubungan antara pers, kekuasaan kolonial, pembentukan kesadaran politik, dan perkembangan gerakan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip Buku

Toer, P. A. (1985). *Sang pemula*. Hasta Mitra.

Arsip Surat Kabar

Soerjo, T. A. (1909). Persdelict: Umpatan

(Tirta Adhi Soerjo kontra A. Simon). Medan Prijaji nomor 19. *Perpustakaan Nasional RI*.

Soerjo, T. A. (1910, 8 Januari). Sekolah hakim dan dokter. Medan Prijaji tahun ke IV nomor 1. *archive.org*.

Soerjo, T. A. (1910, 26 Februari). Deradjad beomi poetra. Medan Prijaji tahun ke IV nomor 8. *archive.org*.

Soerjo, T. A. (1910, 12 Maret). Siapa makan tjabe dialah jang kepedesan. Medan Prijaji tahun ke IV nomor 10. *archive.org*.

Soerjo, T. A. (1910, 19 Maret). Kemerdikaan orang ketjil, Wong tjilik ketjepit sampe mendelik. Medan Prijaji tahun ke IV nomor 11. *archive.org*.

Soerjo, T. A. (1910, 26 Maret). Wong tjilik ketjepit sampe mendelik. Medan Prijaji tahun ke IV nomor 12. *archive.org*.

Soerjo, T. A. (1910, 9 April). Koloniale politiek, Wong tjilik ketjepit sampe mendelik. Medan Prijaji tahun ke IV nomor 14. *archive.org*.

Soerjo, T. A. (1910, 23 April). Persdelict. Medan Prijaji tahun ke IV nomor 16. *archive.org*.

Soerjo, T. A. (1910, 30 April). Apa jang Gouv kata dan apa jang Gouv bikin. Medan Prijaji tahun ke IV nomor 17. *archive.org*.

Soerjo, T. A. (1910, 7 Mei). Tanah-tanah partikulier di Djawa. Medan Prijaji tahun ke IV nomor 18. *archive.org*.

Soerjo, T. A. (1910, 21 Mei). Oleh-oleh dari tempat pemboeangan. Medan Prijaji tahun ke IV nomor 20. *archive.org*.

Soerjo, T. A. (1910, 28 Mei). Oleh-oleh dari tempat pemboeangan. Medan Prijaji tahun ke IV nomor 21. *archive.org*.

Soerjo, T. A. (1910, 4 Juni). Oleh-oleh dari tempat pemboeangan. Medan Prijaji tahun ke IV nomor 22. *archive.org*.

Soerjo, T. A. (1910, 11 Juni). Oleh-oleh dari tempat pemboeangan. Medan Prijaji

tahun ke IV nomor 23. *archive.org*.

Soerjo, T. A. (1910, 25 Juni). Oleh-oleh dari tempat pemboeangan. Medan Prijaji tahun ke IV nomor 25. *archive.org*.

Arsip Gambar

Beynon, H. C. (1985). *Tirto Adhi Soerjo* [Gambar]. Leiden University Libraries.

<http://hdl.handle.net/1887.1/item:2543505>

Demmeni, J. (1911). *Arbeiders op een tabaksplantage in Deli* [Gambar]. Leiden University Libraries 37428. <https://hdl.handle.net/1887.1/item:703442>

Soerjo, T. A. (1910). *Surat Kabar Medan Prijaji* [Gambar]. *arcive.org*.

Buku

Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., Jayatmi, I., Satria, E. B., Permana, A. A., Rohman, M. M., Arta, D. N. C., Bani, M. D., Bani, G. A., Haslinah, A., & Wijoyo, E. B. (2023). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori dan praktik*. Get Press Indonesia.

As'ad, M. R. (2012). *Tirto Adhi Soerjo: Bapak pers Indonesia*. Arti Bumi Intaran.

Dahlan, M. M., & Raditya, I. N. (2008). *Karya-karya lengkap Tirto Adhi Soerjo: Pers, pergerakan, dan kebangsaan*. I:Boekoe.

Efendi, A. (2019). *Perkembangan pers di Indonesia*. ALPRIN.

Niel, R. van. (2009). *Munculnya elit modern Indonesia*. Pustaka Jaya.

Sharp, G. (1973). *The politics of nonviolent action*. Porter Sargent Publisher.

Artikel Jurnal:

Adam, A. W. (2023). Indonesia out of exile: How Pramodya's Buru quartet killed a dictatorship, by Max Lane. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 179(3-4), 432-435.

Aini, S., & Aria, R. D. (2018). Surat kabar Soenting Malajoe dan wacana nasionalisme (1912-1921). *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(4), 430-443.

Anggraeni, P. D., Susanto, H., & Pratama, R. A. (2022). Revolusi Indonesia dalam perspektif pro dan kontra Pers nasional periode pasca Proklamasi hingga tercapainya pengakuan kedaulatan. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(1), 35-58.

Cahyani, M. G. (2023). Sejarah perkembangan pers dan pemanfaatan Museum Pers Nasional Sebagai media pembelajaran sejarah masa pergerakan nasional. *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 3(1), 27-39.

Fachrurozi, M. H. (2017). Pers dan bangkitnya kesadaran nasional Indonesia pada awal abad XX. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 12(1), 13-25.

Fachrurozi, M. H. (2019). Politik etis dan bangkitnya kesadaran baru pers bumiputra. *Bihari: Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah*, 2(1), 13-25.

Fahmi, C. (2020). The Dutch colonial economic's policy on natives land property of Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 5(2), 105-120.

Hagen, J. M. (1997). Read all about It: The press and the rise of national consciousness in early twentieth-century Dutch East Indies Society. *Anthropological Quarterly*, 70(3), 107-126.

Herdiani, E. (2016). Metode sejarah dalam

- penelitian tari. *Jurnal Seni Makalangan*, 3(2), 33–45.
- Imanita, M., Perdana, Y., & Pratama, R. A. (2025). Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan sosial politik pada masa pergerakan nasional. *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 5(2), 1–12.
- Insani, M., Imron, A., Susanto, H., & Atika, W. (2021). Bumiputera teachers in ethical politics. *Journal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah (Pesagi)*, 9(1), 1–8.
- Junaidi, Hati, L. P., Nurhabsyah, & Affandi, K. M. (2023). Weaving hope in Tanah Deli: Life and healthcare of plantation workers in the East Sumatra's Plantation Belt, 1870-1940. *Medicina Historica*, 7(2), 1–10.
- Muklis, H., & Saefudin, A. (2024). Resistance through the pen: A critical Analysis of the Role of Prijaji Field in the national movement (1907-1914). *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, 6(2), 239–248.
- Mulyadi, R. J. P. (2021). Press nationalism: A case study of the role of Medan Prijaji in growing national awareness. *The International Journal of Politics and Sociology Research*, 9(3), 102–107.
- Poeze, H. A. (1989). Early Indonesian emancipation Abdul Rivai Van Heuts and The Bintang Hindia. *Bijdragen Tot de Tall-, Land- En Volkenkunde*, 245(1), 87–106.
- Ravando. (2021). Censorship in colonial Indonesia, 1901-1942, by Nobuto Yamamoto. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 177(1), 162–164.
- Ravico, Rochmiatun, E., Sustianingsih, I. M., Susetyo, B., & Nuzulur. (2023). Implementasi heuristik dalam penelitian sejarah bagi mahasiswa. *Chronologia*, 4(3), 118–128.
- Setyowati, A. (2003). Perlawanan Tirto Adhi Soerjo terhadap Belanda. *Wahana: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 1(2), 65–76.
- Subijanto, R. (2017). Enlightenment and the revolutionary press in colonial Indonesia. *International Journal of Communication*, 11, 1357–1377.
- Sukmana, W. J. (2021). Metode penelitian sejarah. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(2), 1–4.
- Usmaedi. (2023). Oeang Republik Indonesia Daerah Banten Sementara (ORIDABS): Sejarah dan peranannya dalam perekonomian daerah Banten 1947-1948. *Kala Manca: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(2), 69–74.
- Waluyo, P. (2003). Pemerintahan Hindia-Belanda di zaman Tirto Adhi Soerjo. *Wahana: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 1(2), 59–64.

Skripsi:

- Amandah, D. (2021). *Peranan nyai dalam transfer budaya di daerah perkebunan Deli tahun 1870-1942*. [Skripsi, Universitas Lampung]. Repository Universitas Lampung.
- Zulaicha, L. (2014). *Metodologi sejarah*. [Skripsi sarjana, UIN Sunan Ampel]. Repository UIN Sunan Ampel Surabaya.